

RENCANA KERJA 2025

DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
JALAN A. THALIB NOMOR 45
KOTA JAMBI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberi gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan untuk menjaga kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini maka diperlukan rancangan awal dari rencana kerja Tahun 2025.

Untuk melaksanakan program pembangunan Tahun 2025 maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja 2025, adalah:

1. Pendahuluan.
2. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024
3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
4. Penutup

B. Dasar Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025 ini disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 20016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja yang memuat uraian singkat, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penulisan rancangan awal Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2025 pada Triwulan II menyesuaikan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Gambaran umum program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. 1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 1. 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
 - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
 - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 2.1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

2.2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

2.2.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi

2.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

2.2.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi

2.2.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan

III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant

4.1.1 Penyediaan Permakanan

4.1.2 Penyediaan Sandang

4.1.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

4.1.4 Penyediaan Alat Bantu

4.1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant

4.1.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

4.1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

4.1.8 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

4.1.9 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

4.1.10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

4.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant

4.2.1 Pengasuhan

4.2.2 Penyediaan Makanan

4.2.3 Penyediaan Sandang

4.2.4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

4.2.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant

4.2.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

4.2.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

4.2.8 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4.2.9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

4.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

- 4.3.1 Penyediaan Permakanan
- 4.3.2 Penyediaan Sandang
- 4.3.3 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
- 4.3.4 Alat Bantu
- 4.3.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
- 4.3.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.3.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 4.3.8 Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas
- 4.3.9 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 4.3.10 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 4.3.11 Pemulasaraan
- 4.3.12 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

4.4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

- 4.4.1 Penyediaan Permakanan
- 4.4.2 Penyediaan Sandang
- 4.4.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
- 4.4.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 4.4.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.4.6 Pemulangan ke Daerah Asal
- 4.4.7 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

4.5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti

- 4.5.1 Penyediaan Permakanan
- 4.5.2 Penyediaan Sandang
- 4.5.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
- 4.5.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
- 4.5.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
- 4.5.6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
- 4.5.7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- 4.5.8 Pemulangan ke Daerah Asal
- 4.5.9 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

- 5.1.1 Pengangkatan Anak antar WNI

5.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- 5.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 5.2.2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5.2.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - 6.1.1 Penyediaan Permakanan
 - 6.1.2 Penyediaan Sandang
 - 6.1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 6.1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 6.1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial

VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 7.1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 7.1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 7.1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - 7.1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- 8.1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - 8.1.1 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
 - 8.1.2 Pendataan Penduduk NonPermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
- 8.2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 8.2.1 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
- 8.3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - 8.3.1 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- 9.1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - 9.1.1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
- 9.2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 9.2.1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- 10.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 10.1.1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 10.1.2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- 10. 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - 10.2.1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 10.2.2 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

11.1. Penyediaan Profil Kependudukan

11.1.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta
Kebutuhan yang lain

Realisasi capaian Program dan Kegiatan pada **Triwulan II** tahun Anggaran 2024 dengan nilai Pagu Rp. **33.010.013.126** adalah **Rp. 30.512.240.928** atau **92.43 %**. Rincian Capaian Realisasi sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 1.
DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANA KEGIATAN (LPPK)
KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
(POSISI: BULAN DESEMBER 2024)

No	Program / Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
		20.566.393.845	19.766.058.101	73,31	73,31	800.335.744
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388.288.976	293.957.895	75,71	75,71	94.331.081
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	388.288.976	293.957.895	75,71	75,71	94.331.081
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.739.594.753	16.626.695.420	99,33	99,33	112.899.333
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.558.754.753	16.454.115.420	99,37	99,37	104.639.333
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	180.840.000	172.580.000	95,43	95,43	8.260.000
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0	0,00	0,00	11.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	0	0,00	0,00	11.000.000
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	940.263.680	733.169.401	77,97	77,97	207.094.279

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.194.600	21.194.600	100,00	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.930.420	73.244.620	73,30	73,30	26.685.800
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.368.480	73.247.500	78,45	78,45	20.120.980
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	213.022.009	143.770.150	67,49	67,49	69.251.859
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.748.171	421.712.531	82,25	82,25	91.035.640
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		411.092.000	405.460.000	98,63	100,00	5.632.000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	411.092.000	405.460.000	98,63	100,00	5.632.000
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.255.564.436	1.100.818.991	87,68	87,68	154.745.445
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	534.564.630	532.667.887	99,65	99,65	1.896.743
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.999.806	568.151.104	78,80	78,80	152.848.702
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		820.590.000	605.956.394	73,84	73,84	214.633.606
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	798.120.000	583.486.394	73,11	73,11	214.633.606
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00	0,00	0

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.470.000	22.470.000	100,00	100,00	0
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		2.313.216.172	2.105.767.192	91,03	91,03	207.448.980
1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		2.313.216.172	2.105.767.192	91,03	91,03	207.448.980
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	265.507.536	251.686.000	94,79	94,79	13.821.536
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	316.494.664	289.659.000	91,52	91,52	26.835.664
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.433.214.000	1.404.756.200	98,01	98,01	28.457.800
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	297.999.972	159.665.992	53,58	53,58	138.333.980
III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		300.001.450	267.766.300	89,26	89,26	32.235.150
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota		300.001.450	267.766.300	89,26	89,26	32.235.150

1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	300.001.450	267.766.300	89,26	89,26	32.235.150
IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		7.499.623.472	6.768.747.479	86,80	86,80	730.875.993
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		3.884.157.305	3.658.408.553	94,19	94,19	225.748.752
1	Penyediaan Permakanan	1.670.301.700	1.638.149.361	98,08	98,08	32.152.339
2	Penyediaan Sandang	218.049.662	214.354.000	98,31	98,31	3.695.662
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.504.128.393	1.462.026.606	97,20	97,20	42.101.787
4	Penyediaan Alat Bantu	0	0	0,00	0,00	0
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	21.552.680	21.407.000	99,32	99,32	145.680
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	271.334.400	227.420.950	83,82	83,82	43.913.450
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.992.672	0	0,00	0,00	20.992.672
8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60.297.798	30.955.000	51,34	51,34	29.342.798
9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	37.500.000	0	0,00	0,00	37.500.000
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	80.000.000	64.095.636	80,12	80,12	15.904.364
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		1.235.881.770	1.063.588.487	86,06	86,07	172.293.283
1	Pengasuhan	10.837.094	0	0,00	0,00	10.837.094

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

2	Penyediaan Makanan	402.290.000	375.005.750	93,22	93,22	27.284.250
3	Penyediaan Sandang	70.682.190	64.733.000	91,58	91,58	5.949.190
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	363.910.526	337.369.520	92,71	92,71	26.541.006
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.203.044	5.023.044	96,54	100,00	180.000
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	78.187.746	53.538.848	68,47	68,47	24.648.898
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	170.507.684	120.289.600	70,55	70,55	50.218.084
8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	134.263.486	107.628.725	80,16	80,16	26.634.761
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		1.613.618.614	1.403.874.139	87,00	87,08	209.744.475
1	Penyediaan Permakanan	785.629.000	710.545.589	90,44	90,44	75.083.411
2	Penyediaan Sandang	104.040.000	102.897.000	98,90	100,00	1.143.000
3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	516.169.830	477.143.806	92,44	92,44	39.026.024
4	Alat Bantu	5.539.014	0	0,00	0,00	5.539.014
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	4.785.531	0	0,00	0,00	4.785.531
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	35.100.000	35.100.000	100,00	100,00	0
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	68.350.248	68.187.744	99,76	100,00	162.504

8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.700.000	0	0,00	0,00	2.700.000
11	Pemulasaraan	32.500.000	10.000.000	30,77	30,77	22.500.000
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	58.804.991	0	0,00	0,00	58.804.991
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		314.008.722	254.670.000	81,10	81,15	59.338.722
1	Penyediaan Permakanan	66.594.000	63.671.000	95,61	95,61	2.923.000
2	Penyediaan Sandang	35.211.078	30.502.500	86,63	86,63	4.708.578
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	76.729.650	74.170.000	96,66	96,66	2.559.650
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	4.331.719	4.191.100	96,75	100,00	140.619
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	27.186.075	0	0,00	0,00	27.186.075
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	52.070.000	45.970.000	88,29	88,29	6.100.000
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	6.425.000	0	0,00	0,00	6.425.000
8	Pemulangan ke Daerah Asal	45.461.200	36.165.400	79,55	79,55	9.295.800
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti		451.957.061	388.206.300	85,89	85,90	63.750.761

1	Penyediaan Permakanan	71.685.000	34.359.400	47,93	47,93	37.325.600
2	Penyediaan Sandang	56.668.139	52.945.100	93,43	93,43	3.723.039
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	123.330.000	117.902.000	95,60	95,60	5.428.000
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.065.022	5.053.000	99,76	100,00	12.022
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	67.950.000	67.075.000	98,71	98,71	875.000
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	57.870.900	52.145.000	90,11	90,11	5.725.900
8	Pemulangan ke Daerah Asal	3.500.000	2.500.000	71,43	71,43	1.000.000
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	65.888.000	56.226.800	85,34	85,34	9.661.200
V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		653.990.700	345.319.331	65,00	65,00	308.671.369
1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		167.990.700	150.582.531	89,64	89,64	17.408.169
1	Pengangkatan Anak antar WNI	167.990.700	150.582.531	89,64	89,64	17.408.169
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		486.000.000	194.736.800	40,07	40,07	291.263.200
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.118.000	104.154.000	65,05	65,05	55.964.000
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	325.882.000	90.582.800	27,80	27,80	235.299.200

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA		456.000.000	449.866.700	98,65	98,65	6.133.300
1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		456.000.000	449.866.700	98,65	98,65	6.133.300
1	Penyediaan Permakanan	359.120.000	358.464.100	99,82	99,82	655.900
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.880.000	20.200.000	96,74	96,74	680.000
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	76.000.000	71.202.600	93,69	93,69	4.797.400
VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		103.762.798	102.782.720	99,06	99,06	980.078
1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		103.762.798	102.782.720	99,06	99,06	980.078
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	21.801.678	20.842.720	95,60	95,60	958.958
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	81.961.120	81.940.000	99,97	99,97	21.120
VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		637.993.479	339.428.429	53,20	53,20	298.565.050
1. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		637.993.479	339.428.429	53,20	53,20	298.565.050
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	637.993.479	339.428.429	53,20	53,20	298.565.050
IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL		217.971.000	153.615.990	70,48	70,48	64.355.010
1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		217.971.000	153.615.990	70,48	70,48	64.355.010
1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	217.971.000	153.615.990	70,48	70,48	64.355.010
X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		252.945.000	212.888.686	83,00	83,00	40.056.314
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi		106.061.000	80.657.481	76,05	76,05	25.403.519

Administrasi Kependudukan Provinsi						
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.061.000	80.657.481	76,05	76,05	25.403.519
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		146.884.000	132.231.205	90,02	90,02	14.652.795
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.884.000	132.231.205	90,02	90,02	14.652.795
XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8.115.210	0	0	0	8.115.210
1. Penyediaan Profil Kependudukan		8.115.210	0	0,00	0,00	8.115.210
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	8.115.210	0	0,00	0,00	8.115.210
TOTAL		33.010.013.126	30.512.240.928	92,43	92,46	2.497.772.198

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, dalam melaksanakan kegiatan dalam kedudukannya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
- f. Meningkatkan ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan PSKS dalam rangka penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kessos.

Adapun lingkup pelayanan wajib Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Bantuan Sosial;
5. Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin; dan

6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. UPTD PSTW Budi Luhur
8. UPTD PSBAWEP Harapan Jaya

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melalui bidang urusan tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja melalui indikator:

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	405	405	100 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	10724	10724	100 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial	Orang	1854	1854	100 %	Sangat Baik
4	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Persen	99.5	99.5	100 %	Sangat Baik
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99	100 %	Sangat Baik
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	30	46.51	100 %	Sangat Baik
5	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat AKIP	Nilai	BB	BB	100 %	Sangat Baik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Nilai	86	92.59	100%	Sangat Baik

1. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut **Pertama**, Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, serta persentase PSKS yang aktif. **Kedua** Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi adalah :

- Pemenuhan SPM Bidang Sosial yang belum maksimal
- Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS PSKS yang belum optimal.
- Proses Verval DTKS Provinsi Jambi yang masih terkendala pada Kabupaten/Kota yang tidak mengganggu Verifikasi dan Validasi DTKS.
- Pemberdayaan PMKS dan PSKS belum berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan Keberfungsian Sosial.
- Sarana dan Prasarana Panti dalam penerapan SPM belum memadai.

b. Isu Strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi adalah :

- Belum optimalnya pengelolaan dan pendataan penduduk di Kabupaten/Kota, hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang belum terdaftar sehingga tidak memiliki identitas, distribusi penduduk pindah dan datang, dan pencatatan ke dalam dokumen kependudukan.
- Masih terdapat jumlah penduduk yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil kependudukan, antara lain pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, status anak, kewarganegaraan, dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2025 disusun menyesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026, maka Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM.
2	memantapkan Tata kelola Pemerintah.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil.
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
			Persentase Pengeluaran Profil Kependudukan.

A. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi masih melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
 - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
 - Lainnya

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi

III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

-

IV. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
 - Pengasuhan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemulasaraan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemulangan ke Daerah Asal"
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant

5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
 - Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
 - Pemulangan ke Daerah Asal
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA

V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - Pengangkatan Anak antar WNI
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial

VII. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

VIII. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
3. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk

IX. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

X. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyediaan Profil Kependudukan
 - Penyediaan data kependudukan provinsi
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

B. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian	RKA-KUAPPAS 2025
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	Rp 34.105.251.748
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 33.646.282.048
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Rp 33.646.282.048
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 23.228.985.633
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 548.056.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 548.056.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.800.754.956
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 16.531.754.956
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 269.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 49.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 746.143.467
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 21.198.220
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 84.585.245
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 85.360.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 105.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 450.000.002
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 684.521.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	684.521.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.222.184.610
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	499.564.630
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	722.619.980
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3.177.825.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	3.047.645.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	30.180.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	778.502.200
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Rp	778.502.200
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp	265.507.536
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Rp	316.494.664
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp	196.500.000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp	282.001.450
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rp	282.001.450

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Rp	282.001.450
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	6.574.128.603
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Rp	3.136.520.500
Penyediaan Permakanan	Rp	1.642.327.033
Penyediaan Sandang	Rp	216.003.946
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp	555.012.179
Penyediaan Alat Bantu	Rp	7.200.770
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp	18.548.300
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp	271.000.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	114.527.772
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp	1.050.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	20.000.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp	42.470.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp	39.860.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Rp	208.520.500
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp	1.431.449.627
Pengasuhan	Rp	18.000.000
Penyediaan Makanan	Rp	406.104.083
Penyediaan Sandang	Rp	157.938.738
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp	306.152.670
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp	5.203.044
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp	81.069.746
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	114.775.860
Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Rp	3.600.000
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	151.063.486

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp	80.760.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp	32.160.000
Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Rp	3.400.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Rp	71.222.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Rp	1.116.150.248
Penyediaan Permakanan	Rp	749.860.000
Penyediaan Sandang	Rp	104.508.000
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp	86.758.484
Penyediaan Alat Bantu		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Rp	4.785.531
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp	35.100.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	80.575.946
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Rp	2.700.000
Pemulasaraan	Rp	24.200.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp	27.662.287
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp	384.829.245
Penyediaan Permakanan	Rp	49.275.000
Penyediaan Sandang	Rp	37.796.066
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp	55.374.292
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp	15.640.437
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp	18.232.640
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	45.000.000
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp	19.145.190
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Rp	3.598.000

Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	9.511.620
Pemulangan ke Daerah Asal	Rp	68.792.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Rp	62.464.000
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Rp	505.178.983
Penyediaan Permakanan	Rp	103.250.950
Penyediaan Sandang	Rp	40.317.060
Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Rp	73.147.546
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp	3.755.242
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp	60.000.000
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	42.216.700
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp	96.830.485
Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	4.998.000
Pemulangan ke Daerah Asal	Rp	51.753.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Rp	28.910.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	2.115.189.840
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Rp	80.000.000
Pengangkatan Anak antar WNI	Rp	80.000.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp	2.035.189.840
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp	1.633.214.000
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	152.026.300

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp	249.949.540
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	551.040.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Rp	551.040.000
Penyediaan Permakanan	Rp	361.040.000
Penyediaan Sandang	Rp	50.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp	60.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp	50.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp	30.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp	116.434.322
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp	116.434.322
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp	97.854.322
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp	18.580.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp	458.969.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp	458.969.700
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	128.000.000
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Rp	128.000.000
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Rp	128.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	110.011.000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Rp	110.011.000
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Rp	110.011.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	205.954.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp	106.037.000
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	106.037.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Rp	99.917.000

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	99.917.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp	15.004.700
Penyediaan Profil Kependudukan	Rp	15.004.700
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Rp	15.004.700

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2021-2026, seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis.
3. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2025.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi Jambi, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

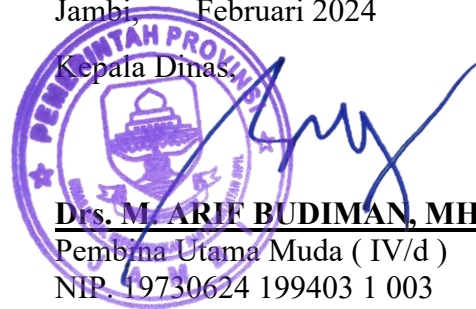
Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan

partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat. Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi (LKj).

Jambi, Februari 2024

Kepala Dinas.



Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19730624 199403 1 003